

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar Rachman, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul, H, Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Arto,Mukti, A, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar*, Jakarta.
- Asmin,1996, *Status Perkawinan Beda Agama*, Jakarta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja,1981, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-UndangPerkawinan Dan Hukum Perdata / BW, Hidakarya Agung*, Jakarta.
- Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita
- Fance. M. Wantu, 2011 *Idee Des Recht:Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. (2021). “Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah”. Muslim Heritage
- Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Jamaluddin, 2009, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*,(Pustaka Bangsa Press Medan.
- M, Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada*, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grop
- Mukti Arto, 2004 *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, cet v, pustaka pelajar, yogyakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*
- Mulia, Musda, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ&SP.
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Cet, 1997Ke-10,284 Jakarta: Gunung Agung,
- Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Tahun 1955. Mengatakan “*Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana*, Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Nuruddin, Amirul, 2002, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta.

Protjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur.

Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Rofiq, Ahmad, 1995 *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Solikin, Nur, 2021, *pengantar metodologi penelitian hukum*, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur

Syarief, E., & Chuandra, U. (2019). "Efektifitas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Tanjungpinang". *Journal of Law and Policy Transformation*

Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prena Media.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, 2014, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

S, Riduan, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni

Soekanto, 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Yogyakarta: Liberty.

Saleh, Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suraiman dan Philips Dillsh, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung. Alfabeta.

B. Skripsi/Jurnal

Ajo, Fransiska Litanía Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, and AndryawanAndryawan. "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Hukum Responsifvol 15 No 2 Agustus 2024

Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020): 4

Baina Sari dkk, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin Mahkamah Syar'iyah (Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 19-36

Deni rahmatillah a.n khofify, *konsep pembatalan perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan kompilasi hukum islam*, hukum islam, vol xvii no. 2 desember 2017

Drs. Ali Uraidi, M.H, Devi Firmansyah, *Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (Studi kasus putusan Agama Semarang Nomor 1447/PDT.G/2011/PA.SM*, *urnal Ilmia Fenomena*, Volume XVI, Nomor 1, Mei 2018: 1704-1719, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/812>

Khoiruddin Nasution, *Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butri UU*" *Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003.*, hlm. 129.

Megawati Ticoalu , Merry E. Kalalo , Maya Sinthia Karundeng *urnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4. Mei 2024*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55713>

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum (Cetakan Ke). Prenada Media Grup*
jurnal Kajian Hukum, Vol. 6 (2) November 2021:25-34, Catur Widia Astuti
PuspitaSari
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3000077&val=27068&title=analisis%20hukum%20terhadap%20terjadinya%20pembatalan%20perkawinan%20karena%20pemalsuan%20identitas>

Putra, Merdi Aditya (2021) *Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas," Indonesian Notary: Vol. 3, Article 16. Available at:*
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/16>

Siwi mattarini *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl) "*

Septiyani, Ismi Tri,(2020) "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal.*" *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 22.

C. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.